



---

**SOSIOLOGI LEMBAGA PENDIDIKAN ALIYAH:  
STUDI TENTANG TANGGUNG JAWAB  
PEMERINTAH, MASYARAKAT, DAN KELUARGA  
DALAM MENEJEMEN AKSES PENDIDIKAN ANAK  
MARJINAL**

---

**Novita Dwi Nur Hidayati<sup>1</sup>, Muhammad Hanif<sup>2</sup>**

Universitas Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto <sup>1,2</sup>

Email: [234110402280@mhs.uinsaizu.ac.id](mailto:234110402280@mhs.uinsaizu.ac.id)<sup>1</sup>, [1MuhHanif@ac.id](mailto:1MuhHanif@ac.id)<sup>2</sup>

**ABSTRACT**

*This study aims to sociologically examine the roles and responsibilities of the government, community, and family in ensuring access to education for marginalized children at Madrasah Aliyah institutions. The research is grounded in the persistently low Net Enrollment Rate (NER) at the senior secondary level, which nationally stands at only 61.65 percent (BPS, 2023), with children from marginalized groups being the most vulnerable to dropping out of school. The study employs a qualitative approach using a case study method, with data collected through in-depth interviews with the Vice Principal of Student Affairs, the Vice Principal of Facilities and Infrastructure, the Vice Principal of Public Relations, and classroom teachers. The findings reveal four primary forms of support for marginalized students: (1) Guidance and Counseling (BK) services that specifically accompany students facing economic and social disadvantages; (2) active involvement of alumni associations in periodic motivational activities; (3) multilayered access to financial assistance through KIP (Smart Indonesia Card), UP2 (Education Program Management Unit), and fee reductions from the pesantren institution; and (4) direct financial assistance from the foundation chairman to boarding students experiencing economic hardship. The discussion is framed using Bourdieu's theory of social reproduction, Putnam's social capital theory, and Bronfenbrenner's ecological development model. The study concludes that pesantren-based Madrasah Aliyah has significant potential as an effective model of inclusive education through multi-stakeholder synergy among institutions, government, communities, and foundations, bound together by Islamic values and a commitment to serving the underprivileged.*

**Keywords :** *marginalized children, Madrasah Aliyah, access to education, social capital, sociology of education.*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengkaji secara sosiologis peran dan tanggung jawab pemerintah, masyarakat, dan keluarga dalam menjamin akses pendidikan anak marjinal pada lembaga Madrasah Aliyah. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada masih rendahnya Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SMA/ sederajat secara nasional yang baru mencapai 61,65 persen (BPS, 2023), dengan anak-anak dari kelompok marjinal sebagai kelompok yang paling rentan mengalami putus sekolah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap Wakil Kepala Bidang Kesiswaan, Wakil Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, Wakil Kepala Bidang Hubungan Masyarakat, serta guru kelas. Hasil penelitian menemukan empat bentuk dukungan utama bagi peserta didik marjinal: (1) layanan Bimbingan dan Konseling (BK) yang secara khusus mendampingi siswa dengan ketertinggalan ekonomi dan sosial; (2) keterlibatan aktif ikatan alumni dalam kegiatan motivasi secara berkala; (3) akses berlapis terhadap bantuan ekonomi berupa KIP, UP2, dan potongan biaya dari lembaga pesantren; serta (4) bantuan langsung dari ketua yayasan kepada peserta didik yang mondok dan kekurangan secara ekonomi. Pembahasan menggunakan kerangka teori reproduksi sosial Bourdieu, modal sosial Putnam, dan ekologi perkembangan Bronfenbrenner. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Madrasah Aliyah berbasis pesantren berpotensi menjadi model pendidikan inklusif yang efektif melalui sinergi multipihak antara lembaga, pemerintah, komunitas, dan yayasan yang diikat oleh nilai-nilai keislaman dan keberpihakan kepada kaum dhuafa.

**Kata Kunci :** anak marjinal, Madrasah Aliyah, akses pendidikan, modal sosial, sosiologi pendidikan.

---

### PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang dijamin secara konstitusional melalui Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.<sup>1</sup> Melalui pendidikan, individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, serta nilai-nilai sosial yang diperlukan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, pendidikan bukan sekadar instrumen peningkatan kualitas sumber daya manusia, melainkan juga merupakan fondasi utama bagi terwujudnya keadilan sosial dan kemajuan bangsa.

---

<sup>1</sup> Moch. Ali Syafa'at, "Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan," *Jurnal Konstitusi* 5, no. 1 (2008): hlm. 10.

Namun, dalam realitas sosial yang ada, akses terhadap pendidikan masih jauh dari pemerataan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 mencatat bahwa Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA/ sederajat) secara nasional baru mencapai sekitar 61,65 persen, yang berarti hampir 40 persen anak usia sekolah menengah atas belum tertampung dalam sistem pendidikan formal.<sup>2</sup> Kesenjangan ini semakin tajam jika dilihat dari distribusi antarwilayah dan kelompok sosial-ekonomi. Anak-anak dari keluarga miskin, daerah terpencil, serta lingkungan rentan sosial menghadapi berbagai hambatan struktural yang menghalangi mereka untuk mengakses pendidikan secara layak. Kondisi ini menempatkan kelompok anak marjinal yakni mereka yang terpinggirkan secara ekonomi, sosial, maupun geografis sebagai kelompok yang paling rentan mengalami putus sekolah dan keterbelakangan pendidikan.

Dalam perspektif sosiologi pendidikan, lembaga pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai agen sosialisasi yang berperan dalam membentuk karakter, identitas, dan mobilitas sosial peserta didik.<sup>3</sup> Teori reproduksi sosial Bourdieu menunjukkan bahwa lembaga pendidikan sering kali justru mereproduksi ketimpangan sosial yang ada apabila tidak dirancang secara inklusif dan berkeadilan.<sup>4</sup> Di sinilah Madrasah Aliyah (MA) sebagai salah satu lembaga pendidikan menengah berbasis Islam memiliki peran strategis. Dengan basis komunitas yang kuat dan orientasi nilai keagamaan yang mengutamakan keadilan serta keberpihakan kepada kaum dhuafa, Madrasah Aliyah berpotensi menjadi lembaga pendidikan inklusif yang mampu menjangkau peserta didik dari lapisan masyarakat paling bawah. Menurut data Kementerian Agama RI (2023), terdapat lebih dari 9.000 Madrasah Aliyah yang tersebar di seluruh Indonesia, sebagian besar berlokasi di daerah pedesaan dan pinggiran kota, menjadikannya salah satu lembaga yang paling dekat dengan komunitas marjinal.<sup>5</sup>

Meskipun demikian, berbagai hambatan struktural masih menghalangi upaya Madrasah Aliyah dalam menjamin akses pendidikan bagi anak-anak marjinal. Faktor kemiskinan dan rendahnya pendapatan keluarga menjadi penyebab utama tingginya angka putus sekolah di kalangan peserta didik dari kelompok tidak mampu. Penelitian Suryahadi et al. (2020) menunjukkan bahwa anak-anak dari rumah tangga yang masuk dalam kategori 20 persen pendapatan terendah memiliki probabilitas 3,5 kali lebih besar untuk tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang

---

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik, *Potret Pendidikan Indonesia: Statistik Pendidikan 2023* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2023), hlm. 72.

<sup>3</sup> Talcott Parsons, "The School Class as a Social System: Some of Its Functions in American Society," *Harvard Educational Review* 29, no. 4 (1959): hlm. 297-298.

<sup>4</sup> Pierre Bourdieu dan Jean-Claude Passeron, *Reproduction in Education, Society and Culture* (London: SAGE Publications, 1990), hlm. 45.

<sup>5</sup> Ittihad, "Pendidikan dalam Bingkai Kelembagaan; Studi Kasus di Madrasah Aliyah Syaikh Zainuddin," *Fondatia: Jurnal Pendidikan Dasar* 1, no. 2 (2017): hlm. 155,

menengah dibandingkan kelompok pendapatan menengah ke atas.<sup>6</sup> Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan orang tua, keterbatasan sarana dan prasarana sekolah, jarak tempuh yang jauh, serta kurangnya dukungan sosial dari lingkungan sekitar turut memperparah kondisi tersebut. Dalam banyak kasus, anak-anak dari keluarga marjinal terpaksa bekerja untuk membantu perekonomian keluarga sehingga mereka kehilangan kesempatan untuk mengikuti pendidikan secara penuh.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak pendidikan tidak dapat dibebankan kepada lembaga pendidikan semata, melainkan memerlukan keterlibatan sinergis dari berbagai pihak. Pemerintah, sebagai pemegang amanat konstitusi, bertanggung jawab menyediakan kebijakan afirmatif, anggaran yang memadai, serta fasilitas pendidikan yang merata hingga ke daerah terpencil. Program-program seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan beasiswa afirmasi merupakan wujud komitmen pemerintah, namun implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala birokrasi dan ketidaktepatan sasaran.<sup>7</sup> Di sisi lain, masyarakat berperan dalam menciptakan lingkungan sosial yang kondusif bagi keberlangsungan pendidikan melalui partisipasi aktif, pengawasan komunitas, serta pemberian dukungan moral dan material kepada peserta didik yang membutuhkan. Sementara itu, keluarga sebagai lingkungan pendidikan pertama dan utama memiliki pengaruh besar terhadap motivasi belajar, dukungan emosional, serta keberhasilan akademik anak.<sup>8</sup> Sinergi antara ketiga unsur inilah pemerintah, masyarakat, dan keluarga yang menjadi tulang punggung bagi terwujudnya akses pendidikan yang berkeadilan bagi anak-anak marjinal.

Kajian-kajian terdahulu telah banyak membahas persoalan pendidikan inklusif dan aksesibilitas pendidikan bagi kelompok marjinal secara umum. Namun, studi yang secara khusus mengkaji dinamika relasi antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga dalam konteks Madrasah Aliyah masih sangat terbatas. Sebagian besar penelitian yang ada berfokus pada sekolah umum (SMA/SMK) atau pesantren sebagai institusi terpisah, sehingga belum menangkap secara utuh kekhasan Madrasah Aliyah sebagai lembaga yang memadukan pendidikan umum dan keagamaan dengan basis komunitas yang kuat. Di samping itu, belum banyak penelitian yang menggunakan pendekatan sosiologis secara mendalam untuk menganalisis interaksi antaraktor pemerintah, masyarakat, dan keluarga dalam

---

<sup>6</sup> Asep Suryahadi et al., "Dampak Sosial Ekonomi Pandemi COVID-19 terhadap Anak-Anak di Indonesia," *SMERU-UNICEF Policy Journal* 1, no. 2 (2020): hlm. 12.

<sup>7</sup> Kemenristekdikti, *Statistik Pendidikan Tinggi Indonesia 2019* (Jakarta: Pusdatin Iptek Dikti Kemenristekdikti, 2019), hlm. 75.

<sup>8</sup> Joyce L. Epstein, *School, Family, and Community Partnerships: Preparing Educators and Improving Schools*, ed. ke-2 (Westview Press, 2011), hlm. 45.

proses penjaminan akses pendidikan di Madrasah Aliyah. Kesenjangan inilah yang menjadi celah penelitian yang hendak diisi oleh studi ini.

Bertolak dari realitas dan kesenjangan kajian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara sosiologis bagaimana peran dan tanggung jawab pemerintah, masyarakat, dan keluarga dalam menjamin akses pendidikan anak marjinal pada lembaga pendidikan Madrasah Aliyah. Dengan menggunakan pendekatan sosiologi pendidikan, penelitian ini akan menganalisis pola interaksi sosial, struktur kekuasaan, serta mekanisme dukungan yang berlangsung di antara ketiga aktor tersebut dalam konteks Madrasah Aliyah. Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan sosiologi lembaga pendidikan Islam, tetapi juga menjadi bahan pertimbangan empiris dalam perumusan kebijakan dan strategi peningkatan pemerataan pendidikan yang lebih efektif dan berkeadilan di Indonesia, khususnya bagi anak-anak yang berasal dari kelompok marjinal.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (*case study*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial yang kompleks, yakni dinamika relasi antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga dalam menjamin akses pendidikan anak marjinal di Madrasah Aliyah. Sebagaimana dikemukakan oleh Creswell, pendekatan kualitatif tepat digunakan ketika peneliti ingin mengeksplorasi makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap suatu masalah sosial atau kemanusiaan.<sup>9</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **HASIL**

Berdasarkan wawancara mendalam terhadap informan kunci di Madrasah Aliyah, diperoleh empat temuan pokok mengenai bentuk-bentuk dukungan yang diberikan kepada peserta didik dari kelompok marjinal. Keempat temuan tersebut disajikan secara deskriptif sebagai berikut.

#### **1. Layanan Bimbingan dan Konseling bagi Peserta Didik Marjinal**

Temuan pertama berkaitan dengan keberadaan layanan Bimbingan dan Konseling (BK) yang secara khusus mendampingi peserta didik dari kelompok marjinal. Wakil Kepala Bidang Kesiswaan menyatakan:

*"Ada beberapa BK yang mendampingi anak yang marjinal atau ketertinggalan, baik itu ekonomi ataupun anak yang harus diperhatikan secara khusus."*<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, ed. ke-4 (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014), hlm. 4.

<sup>10</sup> Wawancara, Waka Kesiswaan, 10 Mei 2026.

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa madrasah telah menyediakan tenaga BK yang tidak hanya menangani permasalahan akademik dan disiplin, tetapi juga secara aktif mendampingi peserta didik yang mengalami ketertinggalan akibat faktor ekonomi maupun kondisi sosial tertentu. Layanan ini bersifat personal dan ditujukan agar peserta didik yang memerlukan perhatian khusus tetap dapat mengikuti proses pembelajaran secara optimal.

## **2. Keterlibatan Ikatan Alumni dalam Kegiatan Motivasi**

Temuan kedua mengungkap peran aktif ikatan alumni dalam mendukung semangat belajar seluruh peserta didik, termasuk kelompok marjinal. Wakil Kepala Bidang Sarana dan Prasarana mengungkapkan:

*"Ada juga ikatan alumni yang sering datang ketika event-event atau acara tertentu, untuk memotivasi adik-adiknya baik itu bagi anak marjinal atau tidak."*<sup>11</sup>

Dari pernyataan tersebut diketahui bahwa ikatan alumni secara rutin hadir dalam berbagai kegiatan di madrasah untuk memberikan motivasi dan berbagi pengalaman kepada para siswa. Kehadiran alumni diberikan secara merata tanpa membedakan latar belakang ekonomi peserta didik, sehingga siswa marjinal pun memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapat inspirasi dari para alumni yang telah sukses.

## **3. Bantuan Ekonomi melalui Program Pemerintah dan Lembaga**

Temuan ketiga berkaitan dengan berbagai bentuk bantuan ekonomi yang dapat diakses peserta didik marjinal, baik bersumber dari pemerintah maupun kebijakan internal lembaga. Guru kelas menyampaikan:

*"Ada bantuan KIP, UP2, dan potongan pembayaran dari lembaga pesantren."*<sup>12</sup>

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa peserta didik marjinal dapat mengakses tiga jalur bantuan secara bersamaan: program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dari pemerintah pusat, mekanisme UP2 (Unit Pengelola Program Pendidikan) dari pemerintah daerah, serta keringanan biaya yang diberikan langsung oleh lembaga pesantren. Ketiga jalur ini bekerja secara berlapis untuk meringankan beban ekonomi yang dihadapi peserta didik dan keluarganya.

## **4. Bantuan Langsung dari Ketua Yayasan kepada Siswa yang Mondok**

Temuan keempat mengungkap bentuk dukungan yang bersifat personal, yakni perhatian langsung dari pimpinan yayasan kepada peserta didik yang tinggal di pesantren dan mengalami kesulitan ekonomi. Wakil Kepala Bidang Humas menyatakan:

*"Ada juga bantuan dari ketua yayasan, bagi anak yang mondok, anak yang kekurangan dalam ekonomi."*<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Wawancara, Waka Kesiswaan, 10 Mei 2026.

<sup>12</sup> Wawancara, Waka Kesiswaan, 10 Mei 2026.

<sup>13</sup> Wawancara, Waka Kesiswaan, 10 Mei 2026.

Pernyataan ini menggambarkan bahwa ketua yayasan tidak hanya berperan secara struktural dalam pengelolaan lembaga, tetapi juga terlibat langsung memberikan dukungan finansial kepada peserta didik mondok yang kurang mampu. Bentuk kepedulian ini merupakan inisiatif personal dari pimpinan yayasan yang mencerminkan komitmen lembaga terhadap keberpihakan kepada peserta didik yang paling membutuhkan.

## **PEMBAHASAN**

Keempat temuan di atas dibahas secara analitis menggunakan kerangka teori sosiologi pendidikan untuk mengungkap makna yang lebih dalam di balik setiap fenomena yang ditemukan di lapangan. Pembahasan ini menelaah keterkaitan antara setiap temuan dengan konsep-konsep teoretis yang relevan, serta implikasinya terhadap upaya penjaminan akses pendidikan bagi anak-anak marjinal di Madrasah Aliyah.

### **1. Layanan BK sebagai Mekanisme Kompensasi Ketimpangan Modal Sosial**

Temuan mengenai layanan BK yang secara khusus mendampingi peserta didik marjinal menunjukkan bahwa madrasah menjalankan fungsi kompensatoris terhadap ketimpangan struktural yang berlangsung di luar lembaga. Dalam perspektif Bourdieu, peserta didik dari keluarga miskin umumnya hadir ke sekolah dengan modal sosial dan budaya yang lebih rendah dibandingkan teman-teman dari keluarga mampu, karena tidak mendapatkan stimulasi intelektual maupun jaringan sosial yang memadai dari lingkungan rumah tangga mereka.<sup>14</sup>

Kehadiran guru BK yang aktif mendampingi kelompok ini menjadi mekanisme kelembagaan yang berupaya mengisi kekosongan modal tersebut. Hal ini sejalan dengan konsep layanan BK komprehensif yang dikemukakan oleh Gysbers dan Henderson, yang menegaskan bahwa bimbingan dan konseling seharusnya bersifat preventif dan developmental, tidak semata-mata reaktif terhadap masalah yang sudah terjadi.<sup>15</sup> Dengan kata lain, layanan BK di madrasah ini secara langsung berkontribusi dalam mencegah potensi putus sekolah dan memastikan keberlangsungan pendidikan bagi kelompok yang paling rentan.

### **2. Alumni sebagai Wujud Bridging Social Capital**

Keterlibatan ikatan alumni dalam kegiatan motivasi di madrasah dapat dianalisis melalui teori modal sosial Putnam sebagai wujud bridging social capital, yakni ikatan sosial yang menghubungkan individu-individu dari latar belakang berbeda dalam jaringan yang saling menguntungkan.<sup>16</sup> Alumni yang hadir berbagi

---

<sup>14</sup> Pierre Bourdieu dan Jean Claude Passeron, *Reproduction in Education, Society and Culture* (London: SAGE Publications, 1977), hlm. 7-8.

<sup>15</sup> Norman C. Gysbers dan Patricia Henderson, *Developing and Managing Your School Guidance and Counseling Program*, ed. ke-5 (Alexandria, VA: American Counseling Association, 2012), hlm. 25.

<sup>16</sup> 1 Robert D. Putnam, *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community* (New York: Simon & Schuster, 2000), hlm. 22-24.

pengalaman berfungsi sebagai role model yang nyata dan relevan, khususnya bagi siswa marjinal yang tidak memiliki referensi kesuksesan di lingkungan keluarganya sendiri.

Kehadiran alumni yang telah berhasil menapaki jenjang pendidikan dan karier yang lebih tinggi memberikan bukti konkret bahwa keterbatasan ekonomi bukan penghalang permanen untuk meraih cita-cita. Hal ini secara tidak langsung memperkuat aspirasi pendidikan (*educational aspiration*) peserta didik dan mengurangi kecenderungan siswa marjinal untuk meremehkan nilai pendidikan bagi diri mereka sendiri, sebagaimana dianalisis oleh Archer et al dalam konsep *scorned capital*.<sup>17</sup>

### 3. Bantuan Berlapis sebagai Model Kemitraan Multi-Pihak

Kombinasi bantuan KIP, UP2, dan potongan biaya dari pesantren yang ditemukan di lapangan mencerminkan bekerjanya model kemitraan multi-pihak (*multi-stakeholder partnership*) dalam menjamin akses pendidikan anak marjinal. UNESCO merekomendasikan model ini sebagai strategi efektif dalam mengatasi ketimpangan akses pendidikan di negara berkembang dengan heterogenitas sosial-ekonomi yang tinggi.<sup>18</sup>

Secara analitis, bantuan KIP merepresentasikan peran negara (*makrosistem*) dalam melindungi hak pendidikan warganya, sementara potongan biaya dari pesantren mewakili respons lembaga (*mesosistem*) terhadap kebutuhan nyata di lapangan. Kombinasi keduanya menciptakan jaring pengaman berlapis yang jauh lebih tangguh dibandingkan jika peserta didik hanya mengandalkan satu sumber bantuan saja. Hal ini sangat relevan dalam konteks Indonesia, di mana besaran bantuan KIP sering kali belum mencukupi seluruh kebutuhan biaya pendidikan peserta didik.<sup>19</sup>

### 4. Kepedulian Yayasan sebagai Manifestasi Bonding Social Capital

Bantuan langsung dari ketua yayasan kepada peserta didik yang mondok dan kekurangan secara ekonomi merupakan manifestasi dari bonding social capital, yakni ikatan sosial yang kuat dalam suatu komunitas berdasarkan kepercayaan, solidaritas, dan rasa tanggung jawab bersama.<sup>20</sup> Dalam tradisi pesantren dan madrasah berbasis yayasan, hubungan antara pimpinan lembaga dengan peserta didik tidak hanya bersifat institusional, melainkan juga memiliki dimensi moral-

---

<sup>17</sup> Louise Archer dkk., "Science Capital: A Conceptual, Methodological, and Empirical Argument for Extending Bourdieusian Notions of Capital Beyond the Arts," *Journal of Research in Science Teaching* 52, no. 7 (2015): hlm. 930.

<sup>18</sup> UNESCO, *Global Education Monitoring Report 2020: Inclusion and Education: All Means All* (Paris: UNESCO, 2020), 45, diakses 12 Juni 2026, unesco.org.

<sup>19</sup> Mohammad Al Faruq dan Dian Sudiantini, "Tantangan dan Solusi dalam Pengelolaan Keuangan Mahasiswa Penerima KIP Kuliah di Institut Bisnis dan Teknologi Kalimantan," *Jurnal Manajemen dan Riset Inovasi* 3, no. 1 (2025): 12-25,

<sup>20</sup> Robert D. Putnam, *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community* (New York: Simon & Schuster, 2000), hlm. 22-24.

keagamaan yang mendalam.

Tanggung jawab pengasuh atau pimpinan yayasan terhadap peserta didik dipandang bukan sekadar kewajiban manajerial, melainkan kewajiban spiritual yang berakar pada nilai-nilai Islam tentang kepedulian terhadap kaum dhuafa. Hal inilah yang menjadikan madrasah berbasis pesantren memiliki keunggulan komparatif dibandingkan sekolah umum dalam hal responsivitas terhadap kebutuhan sosial-ekonomi peserta didiknya. Pemimpin lembaga berperan bukan hanya sebagai administrator, tetapi sekaligus sebagai pelindung sosial yang secara aktif hadir di tengah kesulitan peserta didik.

### **5. Sintesis: Ekologi Pendidikan Inklusif di Madrasah Aliyah**

Secara keseluruhan, keempat temuan dan pembahasannya menunjukkan bahwa upaya menjamin akses pendidikan bagi anak marjinal di Madrasah Aliyah berlangsung dalam sebuah ekosistem dukungan yang melibatkan berbagai aktor pada lapisan yang berbeda namun saling melengkapi. Pola ini sangat sesuai dengan kerangka ekologi perkembangan manusia yang menegaskan bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh interaksi antara mikrosistem (keluarga), mesosistem (sekolah dan komunitas), dan makrosistem (kebijakan pemerintah).<sup>21</sup>

Dalam konteks Madrasah Aliyah yang diteliti, madrasah berperan sebagai titik temu dari seluruh lapisan sistem tersebut secara simultan. Layanan BK menghubungkan kebutuhan individual siswa dengan sumber daya lembaga. Ikatan alumni memperluas jaringan sosial peserta didik ke luar tembok madrasah. Program KIP dan UP2 menghadirkan intervensi negara hingga ke tingkat individu. Sementara itu, kepedulian langsung dari ketua yayasan menciptakan iklim kelembagaan yang humanis dan berpihak kepada yang lemah. Sinergi seluruh unsur inilah yang menjadikan Madrasah Aliyah bukan sekadar lembaga pendidikan dalam arti sempit, tetapi juga sebagai pusat jaringan sosial yang aktif memperjuangkan pemerataan akses pendidikan bagi anak-anak yang paling membutuhkan

### **KESIMPULAN**

Penelitian ini berhasil mengungkap bahwa penjaminan akses pendidikan bagi anak-anak marjinal di Madrasah Aliyah tidak bertumpu pada satu aktor tunggal, melainkan terwujud melalui sinergi nyata antara lembaga pendidikan, pemerintah, komunitas alumni, dan pimpinan yayasan yang bekerja secara berlapis dan saling melengkapi. Temuan ini menegaskan bahwa pendekatan multipihak bukan sekadar gagasan normatif, melainkan praktik yang benar-benar hidup dan berjalan di lapangan dalam konteks madrasah berbasis pesantren.

Dari sisi kelembagaan, layanan Bimbingan dan Konseling yang secara khusus mendampingi peserta didik marjinal membuktikan bahwa madrasah telah

---

<sup>21</sup> Urie Bronfenbrenner, *The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1979), hlm. 22–26.

mengambil peran aktif melampaui fungsi pengajaran semata. BK hadir sebagai mekanisme kompensasi yang berupaya mengisi kekosongan dukungan yang tidak dapat disediakan oleh keluarga, sehingga peserta didik yang paling rentan tetap memiliki kesempatan untuk mengikuti proses pembelajaran secara optimal dan tidak terancam putus sekolah hanya karena keterbatasan sosial-ekonomi.

Dari sisi komunitas, keterlibatan ikatan alumni yang secara rutin hadir memberikan motivasi kepada seluruh peserta didik tanpa memandang latar belakang ekonomi menunjukkan bahwa jaringan sosial madrasah tidak berhenti di dalam tembok lembaga. Alumni yang telah berhasil menjadi jembatan antara realitas keterbatasan yang dihadapi peserta didik marjinal saat ini dengan kemungkinan masa depan yang lebih baik, sehingga aspirasi pendidikan mereka terus terjaga dan tidak padam oleh kondisi ekonomi keluarga.

Dari sisi dukungan ekonomi, kombinasi program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dari pemerintah pusat, mekanisme UP2 dari pemerintah daerah, serta kebijakan potongan biaya dari lembaga pesantren membentuk jaring pengaman finansial berlapis yang terbukti lebih efektif dalam mengurangi hambatan ekonomi dibandingkan jika peserta didik hanya mengandalkan satu sumber bantuan. Hal ini mencerminkan wujud nyata dari tanggung jawab bersama antara negara dan lembaga pendidikan dalam menjamin hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan yang layak, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

Dari sisi kepemimpinan, kepedulian personal ketua yayasan yang secara langsung memberikan bantuan kepada peserta didik yang mondok dan kekurangan secara ekonomi memperkuat temuan bahwa madrasah berbasis pesantren memiliki keunggulan khas dibandingkan lembaga pendidikan umum. Kepedulian ini bukan sekadar inisiatif individual, melainkan cerminan dari nilai-nilai keislaman yang telah menjadi etos kelembagaan, yakni keberpihakan yang tulus kepada kelompok yang paling membutuhkan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa Madrasah Aliyah memiliki potensi besar sebagai motor pemerataan pendidikan di Indonesia, khususnya bagi anak-anak dari kelompok marjinal. Keberhasilan madrasah dalam mengintegrasikan peran pemerintah, komunitas, dan lembaga ke dalam satu ekosistem pendidikan yang inklusif dan manusiawi memberikan pelajaran penting bagi pengembangan kebijakan pendidikan nasional: bahwa pemerataan akses pendidikan hanya akan terwujud secara bermakna apabila seluruh pemangku kepentingan negara, lembaga pendidikan, komunitas, dan keluarga bersedia hadir bersama, bersinergi, dan berbagi tanggung jawab secara nyata di lapangan.

## DAFTAR PUSTAKA

Asep Suryahadi et al., "Dampak Sosial Ekonomi Pandemi COVID-19 terhadap Anak-Anak di Indonesia," *SMERU-UNICEF Policy Journal* 1, no. 2 (2020).

- Badan Pusat Statistik, *Potret Pendidikan Indonesia: Statistik Pendidikan 2023* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2023).
- Ittihad, "Pendidikan dalam Bingkai Kelembagaan; Studi Kasus di Madrasah Aliyah Syaikh Zainuddin," *Fondatia: Jurnal Pendidikan Dasar* 1, no. 2 (2017).
- John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, ed. ke-4 (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014).
- Joyce L. Epstein, *School, Family, and Community Partnerships: Preparing Educators and Improving Schools*, ed. ke-2 (Westview Press, 2011).
- Kemenristekdikti, *Statistik Pendidikan Tinggi Indonesia 2019* (Jakarta: Pusdatin Iptek Dikti Kemenristekdikti, 2019).
- Louise Archer dkk., "Science Capital': A Conceptual, Methodological, and Empirical Argument for Extending Bourdieusian Notions of Capital Beyond the Arts," *Journal of Research in Science Teaching* 52, no. 7 (2015).
- Moch. Ali Syafa'at, "Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan," *Jurnal Konstitusi* 5, no. 1 (2008).
- Mohammad Al Faruq dan Dian Sudiantini, "Tantangan dan Solusi dalam Pengelolaan Keuangan Mahasiswa Penerima KIP Kuliah di Institut Bisnis dan Teknologi Kalimantan," *Jurnal Manajemen dan Riset Inovasi* 3, no. 1 (2025).
- Norman C. Gysbers dan Patricia Henderson, *Developing and Managing Your School Guidance and Counseling Program*, ed. ke-5 (Alexandria, VA: American Counseling Association, 2012), hlm. 25.
- Pierre Bourdieu dan Jean Claude Passeron, *Reproduction in Education, Society and Culture* (London: SAGE Publications, 1977).
- Pierre Bourdieu dan Jean-Claude Passeron, *Reproduction in Education, Society and Culture* (London: SAGE Publications, 1990).
- Robert D. Putnam, *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community* (New York: Simon & Schuster, 2000).
- Robert D. Putnam, *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community* (New York: Simon & Schuster, 2000).
- Talcott Parsons, "The School Class as a Social System: Some of Its Functions in American Society," *Harvard Educational Review* 29, no. 4 (1959).
- UNESCO, *Global Education Monitoring Report 2020: Inclusion and Education: All Means All* (Paris: UNESCO, 2020), 45, diakses 12 Juni 2026, unesco.org.
- Urie Bronfenbrenner, *The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1979).